

BAB I

PENDAHULUAAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil, perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, maka perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut Anjarwati (2012) akuntabilitas kinerja itu sendiri adalah suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum dalam suatu organisasi kepada seseorang yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemringtah (LAKIP) adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai atau digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan (Yusrianti dan Rika, 2015). Sedangkan Menurut Rahmadan (2014) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan pertanggungjawaban untuk disusun oleh instansi pemerintah kepada

publik dan pejabat berwenang yang merupakan suatu kewajiban untuk disusun oleh instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga adalah perwujudan kewajiban Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dengan dilakukannya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, telah berimplikasi terhadap perubahan paradigma dan pengelolaan pemerintah dan pembangunan yang ada di daerah. Sejalan dengan itu sesuai Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah termasuk pemerintahan Daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 merupakan dampak dari perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dimaksud sebagai media informasi sekaligus bentuk akuntabilitas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun.

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan atau kegagalan kinerja yang ingin dicapai organisasi dan diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali dimasa yang akan datang antara lain dengan dilakukannya melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja. Serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas dilingkungan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali.

Perhatian pemerintahan yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dianggap berhasil apabila sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah,

walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dibawah standar.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi. Karena sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi periode lalu, periode sekarang, dan periode yang akan datang. Sehingga dapat diketahui kinerja mengalami peningkatan atau penurunan dalam mencapai tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi tersebut. pengukuran kinerja juga sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan tugas lebih baik.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) juga berlaku bagi dinas-dinas yang ada di daerah dalam mengembang tugas pokok dan fungsinya, sehingga diharapkan dinas-dinas tersebut dapat dilaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban dan pelaporan segala aktivitas dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali berdasarkan Permen PAN Nomor.29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menjadi pedoman penyusunan dan acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyajikan laporan tersebut sebagai alat pengukur tingkat kesuksesan kinerja. Laporan ini disajikan atas berbagai laporan yang sama dari setiap instansi/SKPD melalui hasil evaluasi dan rangkuman berbagai kinerja yang dihasilkan sedangkan tujuan dan amanat laporan tersebut dapat disampaikan.

Menurut Santoso (2013) Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanat. Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi instansi pemerintahan untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintahan tersebut.

LAKIP yang disampaikan oleh instansi pemerintah sangat bermanfaat untuk peranggungjawaban dari bawahan kepada atasa atau kepada unit yang rendah kepada unit yang lebih tinggi, untuk bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan kearah perbaikan dalam mencapai efesiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta keataan terhadap peraturan

undang-undang yang berlaku dalam rangka misi instansi, mengevaluasi dan menilai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul **“ANALISIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan maka diperoleh rumusan masalah adalah:

Bagaimana menganalisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disajika berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Apakah sudah mengacu pada Permen PAN No.29 tahun 2010.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali terhadap fungsinya sebagai penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta mengetahui kendala apa saja yang ada dalam penyajikan LAKIP yang mengacu pada Permen PAN No. 29 tahun 2010.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

a. Bagi Penulis:

- Menambah pemahaman kegiatan dan cara kerja yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- Menambah pengetahuan bagi penulis.

b. Bagi Pembaca:

- Dapat tambahan ilmu pengetahuan
- Mengetahui tentang kegiatan dan cara kerja yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada khususnya.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Sebagai referensi dan tambahan literatur

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematik Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang secara ringkas menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti dan penelitian sebelumnya.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu subyek penelitian dan obyek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dan hasil analisis data dan intrepresentasi hasil penelitian.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta berisi tentang saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk obyek penelitian maupun bagi penelitian yang selajutnya.